

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi ini, di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut *Good Government Governance*, termasuk di Indonesia. Menurut Sedarmayanti (2012:10), terselenggaranya *Good Government Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2004:36), salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja

keuangan kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kemudian disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai laporan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

- a. Relevan. Apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

- b. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan. Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Kegagalan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang

ditetapkan pemerintah. Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dandidukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Selain Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern juga memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses dan mengelola informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Menurut Widjanto (2001:89), secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu penyiapan laporan pemanfaatan teknologi akan meningkatkan ketepatan waktu LKPD. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukoharjo dinilai memenuhi kriteria dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Dari uraian diatas, topik tersebut menarik untuk dijadikan sebagai judul penelitian, maka penulis melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian in akan menganalisa tentang pengaruh pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dalam peneletian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Teknologi Informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan sumber daya, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan

menerapkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang telah diperoleh dibangku kuliah ke dalam kenyataan yang sesungguhnya serta menambah wawasan tentang Akuntansi Sektor Publik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumbangan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya akuntansi sektor publik dalam kaitannya dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, pengukuran variabel, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.